

Optimizing Economic Development For The Poor And Stunting In Soppeng Regency, South Sulawesi

Arnas Hasanuddin^{1*}, Achmad Anzhari Hasanuddin², Risman³

^{1,3*} Universitas Wira Bhakti, STIM Lasharan Jaya²

ARTICLE INFO



ISSN: 2620-6196
Vol. 8 Issue 2 (2025)

Article history:

Received - 03 July 2025

Revised - 15 July 2025

Accepted - 19 July 2025

Email Correspondence:

arnashasanuddin94@gmail.com

aznhari182182@gmail.com

rismanwirabhakti@gmail.com

Keywords:

Economic development, Income distribution, Human development, Poverty, Stunting

ABSTRAK

This study aims to analyze the relationship between economic growth, poverty, and stunting in Soppeng Regency, South Sulawesi Province, and to identify factors that influence the effectiveness of economic development in reducing poverty and stunting rates. The research approach uses qualitative and quantitative methods with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, and Focus Group Discussions (FGD) involving the poor, health workers, and policy makers.

The results show that economic growth in Soppeng Regency during the 2016–2025 period has a negative correlation with poverty levels, with an average decrease of 0.57% per year. However, income inequality (Gini Ratio) has actually increased from 0.32 to 0.41, indicating that the benefits of growth have not been distributed evenly. In addition, the stunting rate remains high at around 30%, influenced by low access to nutritious food, health services, and the level of public knowledge about nutrition.

These findings confirm that economic development in Soppeng is not yet fully pro-poor and pro-human development. Therefore, more inclusive policies are needed through improved access to infrastructure, strengthened integrated nutrition programs, and sustainable local economic development to reduce poverty and the prevalence of stunting.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1–4) UUD Republik Indonesia 1945, yang mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat anak-anak miskin dan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, isu kemiskinan tidak lepas dari isu ketimpangan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mencerminkan pembangunan yang adil jika tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang adil dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin. Dalam konteks ini, stunting merupakan indikator penting kualitas perkembangan manusia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, kognitif, dan produktif seseorang.

Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi masalah ganda yaitu kemiskinan dan angka stunting yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka kemiskinan di Soppeng masih sekitar 11-12 persen, sedangkan prevalensi stunting mencapai sekitar 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif dan belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin. Ketimpangan pendapatan juga masih cukup tinggi, dengan rasio Gini 0,41 pada tahun 2024.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya pro-miskin (menguntungkan orang miskin) dan pro-pembangunan manusia (berorientasi pada pembangunan manusia). Diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan, memperluas akses lapangan kerja, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kesehatan masyarakat dan gizi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan stunting di Kabupaten Soppeng, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembangunan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan stunting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian berjudul "Mengoptimalkan Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Masyarakat Miskin dan Stunting di Sulawesi Selatan" dapat dijelaskan melalui tahapan dan pendekatan sebagai berikut:

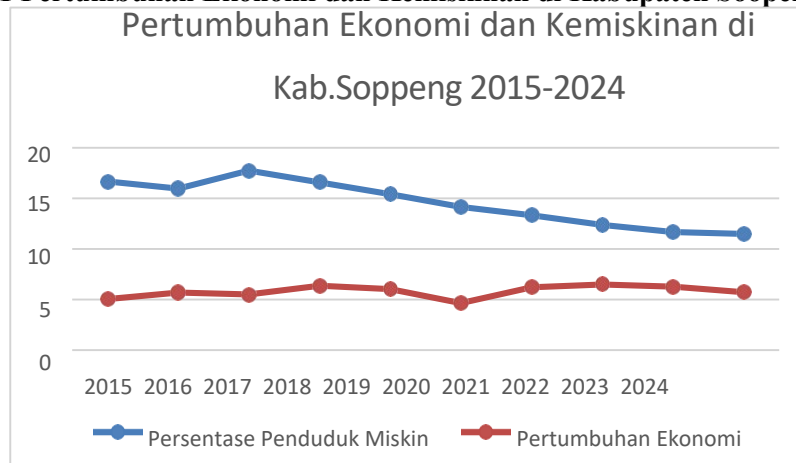
Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang dampak pembangunan ekonomi terhadap masyarakat miskin dan stunting di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi masyarakat, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait mengenai masalah kemiskinan dan stunting.
2. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemiskinan dan pengurangan stunting, serta untuk menentukan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi bias dalam kebijakan pembangunan menggunakan formulasi statis.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - Survei (Kuesioner): Survei akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat miskin, keluarga yang terkena stunting, dan berbagai pihak terkait (pemerintah, LSM, dan organisasi sosial lainnya). Kuesioner ini akan mengumpulkan data tentang akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan ekonomi.
 - Wawancara Mendalam: Wawancara dengan pemangku kepentingan utama seperti pejabat pemerintah, pakar kesehatan, dan penerima manfaat program pembangunan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bias kebijakan dan dampaknya terhadap orang miskin dan stunting.
 - Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok terfokus yang melibatkan masyarakat miskin, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang efektivitas program pembangunan yang ada.
 - Alat Analisis: (1) Analisis Deskriptif; (2) Analisis Regresi (Analisis Statistik Kuantitatif); (c). Focus Group Discussion (FGD)

Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yaitu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Soppeng selama periode 2016-2025, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Soopeng 2016-2025



Sumber: BPS 2025

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan cenderung menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Selama periode 2016-2025, angka kemiskinan mengalami penurunan rata-rata tahunan sebesar 0,57% per tahun, yang masih lebih tinggi dibandingkan capaian kabupaten lain di provinsi Sulawesi Selatan, seperti Takalar, Sidrap, dan Takalar yang hanya sekitar 0,26% per tahun.

Secara umum, perekonomian Kabupaten Soppeng diperkirakan akan menurun sebesar 6,2% pada 2023-2024. Terlepas dari tren penurunan ini, tingkat pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Meski tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, di atas 5%, hal ini tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selama periode 2016-2025, ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Soppeng terus meningkat. Meski begitu, kemiskinan mengalami tren penurunan selama periode ini dan jika ini terus berlanjut, bisa turun di bawah 10%, yang merupakan hal yang positif. Namun, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan tidak efektif selama periode ini karena ketimpangan distribusi pendapatan terus meningkat. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan akan menurun jika, selama periode yang sama, ketimpangan distribusi pendapatan benar-benar meningkat, sehingga mengurangi sejauh mana pertumbuhan ekonomi menguntungkan orang miskin. Namun, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Soppeng selama periode ini tidak pro-miskin. Untuk menentukan hal ini dengan lebih akurat, kami menggunakan Pro Poor Growth Index (PPGI).

Selama periode 2016-2025, angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng tetap berada di angka dua digit, berkisar antara 12% hingga 16%, dan menunjukkan tren negatif atau menurun. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka mencapai dua digit pada 2017-2019 dan terus menurun sejak saat itu. Namun, hal ini tidak disertai dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Selama periode ini, ketimpangan distribusi pendapatan justru menunjukkan tren positif. Ketimpangan distribusi pendapatan ini akan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Sajrone dekade kepungkur, koefisien Gini berkisar antara 0,32 nganti 0,42. Kondisi ini akan semakin memprihatinkan jika koefisien Gini di atas 50% atau 0,5, karena dapat memicu konflik sosial di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas suatu wilayah.

Data pada Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan tingkat ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran di Kabupaten Soppeng selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2016 hingga 2025. Selama periode 2016-2025, tingkat pengangguran cenderung menurun dan diperkirakan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan selama periode tersebut.

Tabel 1.1 Tingkat Ketidaksetaraan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Kabupaten Soppeng Periode 2016-2025

Tahun	Bahan kimia (%)	Ketimpangan/Gini Ratio (%)	Pengangguran (%)
2015	16.66	0.32	9.86
2016	15.97	0.36	11.24
2017	17.75	0.33	10.28
2018	16.58	0.36	9.11
2019	15.42	0.35	8.39
2020	14.15	0.37	7.87
2021	13.33	0.38	7.14
2022	12.36	0.41	6.56
2023	11.66	0.41	6.14
2024	11.47	0.41	6.25

Sumber: BPS 2025

Pengangguran menjadi salah satu kendala kemajuan ekonomi di Kabupaten Soppeng. Pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi positif, sehingga ketika pengangguran meningkat, jumlah orang miskin juga meningkat. Hal ini dikarenakan pengangguran mengurangi pendapatan, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan individu atau rumah tangga. Penurunan kesejahteraan akibat efek pengangguran meningkatkan kemungkinan individu atau rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi berada dalam tren positif, pengangguran cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi pro-job agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Hal ini akan membuat distribusi pendapatan lebih merata sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati efek pertumbuhan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, sehingga mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng tercatat sekitar 9,5% dari total penduduk.

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Soppeng:

1. Akses Infrastruktur Terbatas: Meskipun Soppeng memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian dan perikanan, akses ke infrastruktur seperti jalan dan transportasi tetap menjadi tantangan di beberapa daerah terpencil.
2. Sektor Pertanian: Sebagian besar penduduk di Soppeng bergantung pada sektor pertanian, yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil.
3. Pendidikan dan Kesehatan: Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa daerah Soppeng masih terbatas, yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan dan pendapatan jangka panjang masyarakat.

Sementara itu, stunting di Kabupaten Soppeng relatif tinggi, terutama di kalangan balita. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 30% anak di Soppeng menderita stunting, angka yang jauh di atas standar nasional yang direkomendasikan oleh WHO. Penyebab utama stunting di daerah ini antara lain:

- Kurangnya Akses ke Makanan Bergizi: Banyak keluarga miskin mengalami kesulitan mengakses atau membeli makanan bergizi, terutama untuk ibu hamil dan balita. Di beberapa daerah, pola makan masyarakat masih mengandalkan makanan pokok yang kekurangan nutrisi.
- Kurangnya Pengetahuan Gizi: Banyak ibu rumah tangga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya gizi seimbang, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan.
- Akses Terbatas ke Perawatan Kesehatan: Layanan kesehatan di daerah pedesaan seringkali terbatas, dan ada kekurangan tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak.

SIMPULAN

Penelitian tentang optimalisasi pembangunan ekonomi bagi masyarakat miskin dan terhambat di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan, artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan cenderung menurun. Namun, pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemiskinan karena masih ada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi.

Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan rata-rata 0,57% per tahun, ketimpangan ekonomi (Rasio Gini) sebenarnya meningkat, menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, tingginya angka stunting (sekitar 30%) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan sumber daya manusia. Faktor utama yang berkontribusi antara lain terbatasnya akses ke infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan rendahnya pengetahuan gizi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di Soppeng belum sepenuhnya pro-miskin dan pro-human development, membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan merata.

Referensi :

- Adams, RH 2003. Pertumbuhan Ekonomi, Ketidaksetaraan, dan Kemiskinan. *Kertas Kerja Penelitian Kebijakan Bank Dunia, Februari 2013*.
- Alamsyah, F., & Fitri, R. (2023). Evaluasi kebijakan ekonomi dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan di daerah terpencil. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, 20(2), 77-90.
- Bates, LM (2017). *Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Kesehatan Anak dan Stunting*. Tinjauan Pembangunan Internasional, 44(2), 125-134.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2016 – 2025.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Tingkat Hidup Pekerja*.
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S., & Sutanto, A. (2023). Optimalisasi keberpihakan pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan dan stunting. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, 15(3), 123-145.
- Mulyani, D., & Prabowo, S. (2022). Integrasi kebijakan pembangunan ekonomi untuk pengurangan stunting dan kemiskinan di kawasan pedesaan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Sosial*, 19(1), 45-67.
- Yuliana, L., & Santoso, R. (2024). Analisis kebijakan pembangunan ekonomi dalam menangani kemiskinan dan stunting di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan*, 17(5), 210-225.